

SUPAYA PARA MANTAN PRESIDEN BISA BERTEMU

Prabowo Serious Bentuk 'Presidential Club'

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokman, presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki niat serius untuk membentuk 'Presidential Club'. Bahkan, Prabowo sudah mendiskusikan hal tersebut sejak bertahun-tahun lalu bersama para kader Partai Gerindra untuk mengakomodasi para Presiden RI terdahulu dalam suatu forum demi membangun bangsa.

"Saya ingat betul, mungkin sekitar tahun 2014 Pak Prabowo itu pernah menyampaikan ide tersebut," kata Habiburokman saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (6/5).

Ia mengatakan, tempat diskusi paling tepat terkait kebijakan-kebijakan pembangunan bangsa adalah bersama para pemimpin tertinggi yang juga pernah merumuskan kebijakan negara di masa silam. Sejauh ini, komunikasi antara pihak Prabowo bersama para presiden sebelumnya yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sangat baik.

Khusus terkait Megawati, ia yakin Presiden ke-5 RI itu bakal bertemu Prabowo untuk membahas kabinet pemerintahan ke depan, termasuk membicarakan gagasan 'Presidential Club'. "Saya pikir secara langsung atau tidak langsung, sudah sampai ide ini kepada Ibu Mega, kami akan berkomunikasi dengan jubi-jubir PDIP juga," ucapnya.

Mengenai format 'Presidential Club', pihaknya, terbuka untuk menerima saran dan masukan. Namun, perkumpulan antar para presiden itu harus diberikan tempat yang khusus. "Hal yang penting ada sarana di mana para presi-

den yang pernah menjabat tersebut bisa memberikan masukan secara eksklusif. Beliau kan presiden yang pernah menjabat, tentu kita harus beri tempat yang lebih terhormat," tutur Habiburokman.

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengungkapkan rencana Prabowo untuk membentuk 'Presidential Club' yang diisi para mantan Presiden RI yang masih hidup sampai saat ini. Pembentukan klub tersebut, menurut Dahnil, bertujuan agar para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan.

Dahnil mengatakan, Prabowo berharap para pemimpin di Indonesia bisa kompak dan rukun untuk turut berpikir dan bekerja bagi kepentingan rakyat, terlepas dari perbedaan pandangan maupun sikap politik mereka.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberikan dua catatan, untuk ide 'Presidential Club' yang diinisiasi presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada dua hal penting dan menarik dari pembentukan klub silaturahmi presiden dan mantan presiden, yang dinilai positif dan bermanfaat

bagi persatuan bangsa, sehingga perlu didukung dan diterapkan.

Catatan pertama kata Qodari, Prabowo akan mendapatkan masukan dan dukungan untuk pembangunan bangsa Indonesia kedepan, setelah resmi dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024. "Prabowo membutuhkan masukan-masukan sekaligus dukungan politik dari para tokoh-tokoh, yang pernah jadi presiden RI," ujarnya.

Menurut Qodari, dengan forum tersebut Prabowo dapat terbantu untuk memecahkan persoalan bangsa dan mendapatkan masukan serta solusi dari presiden-presiden terdahulu. Masukan mereka secara teknokratis tentu membantu Prabowo untuk menavigasi persoalan serta melihat dan mencari peluang-peluang solusi.

Berbagai persoalan itu diantaranya, pengangguran, investasi, kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur. Catatan kedua, terang Qodari, 'Presidential Club' dapat menjadi tambahan dukungan, baik secara politik di parlemen, maupun dukungan publik untuk Prabowo memimpin Indonesia ke depan.

Selain itu, bonus dari komunitas itu juga bisa menjadi pembawa pesan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dimana para pemimpinnya menjadi cermin keteladanan untuk tetap rukun walaupun berbeda pilihan politik.

Meskipun pembentukan presidential club ini bagus bagi persatuan bangsa, Qodari menilai hal ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing mantan presiden. (Ant/Obi)-f

DARI BAHAYA NARKOBA

Polri Selamatkan 29,1 Juta Jiwa

JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, selama kurun waktu delapan bulan mampu menyelamatkan 29,1 juta jiwa dari bahaya narkoba.

"Ditinjau dari pengungkapan yang kami lakukan, Satgas P3GN Polri telah berhasil menyelamatkan 29,1 juta jiwa dari bahaya narkoba," kata Kepala Satuan Tugas Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri Irfan Pol Asep di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/5).

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, dari kurun waktu 21 September 2023 sampai 6 Mei 2024, Satgas P3GN Polri dari tingkat Bareskrim dan wilayah telah menangkap 28.382 tersangka narkoba. Dari 28.382 tersangka itu, sebanyak 23.333 tersangka sedang dalam proses penyidikan, dan 5.049 tersangka sedang dalam proses rehabilitasi.

Selama periode tersebut, kata Asep, Satgas P3GN Polri telah menerbitkan 19.098 laporan polisi. Dari jumlah laporan

itu, terdapat 10 kasus menonjol yang telah diungkap. "Salah satunya pengungkapan kasus narkoba jenis sabu dengan modus operandi dimasukkan ke dalam kaleng susu bayi berat total 20 kg oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Kaltara," ujar Asep.

Disebutkan, barang bukti yang disita selama periode tersebut terdiri sabu seberat 3,78 ton, ekstasi 1.226.404 butir, ganja seberat 1,78 ton, kokain seberat 11,34 ton, tembakau gorila seberat 141,4 kilogram, ketamine seberat 32,27 kilogram, heroin 86 gram, dan obat keras sebanyak 8.103.730 butir.

Asep yang juga Wakabareskrim Polri mengatakan, pengungkapan ini sebagai wujud komitmen Polri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sesuai atensi Presiden dan Kapolri.

"Kami tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba, baik di tingkat Mabes maupun Polda jajaran, juga masyarakat yang sudah membantu kami," kata Asep. (Ant/San)-f

SEGERA HUBUNGI BADAN PANGAN NASIONAL

Gangguan Pangan Masuk Tanggap Darurat Bencana

JAKARTA (KR) - Pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana pangan didorong untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana bila ada gangguan pasokan pangan. Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan.

"Kepada teman-teman kepala daerah, bila terjadi bencana apa pun yang mengakibatkan gangguan dari pasokan pangan, agar menetapkan status darurat bencana segera, dan dapat segera menghubungi Badan Pangan Nasional," ujar Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsy Tohir di Jakarta, Senin (6/5).

Diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diibangi untaik meleset langka Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu

menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir.

Selain itu, Tomsy menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Dirinya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan. "Begitu (pompa) terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi," jelasnya.

Di lain sisi, Tomsy juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Hal itu terutama terhadap komoditas yang pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga para importir. (Ant/Has)-f

LUMBUNG MATARAMAN DIDUKUNG DAN AIS

Wujudkan Ketahanan Pangan di Tingkat Kalurahan

YOGYA (KR) - Lumbung Mataraman yang dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dukungan dana keistimewaan (danais) manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Di samping dapat mengentaskan kemiskinan juga mengoptimalkan potensi yang dimiliki kalurahan, sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Menurut Paniradya Pati Kaistimewaan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi, tujuan dari Lumbung Mataraman untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus menyediakan ketersediaan pangan di tingkat kalurahan. "Lumbung Mataraman terus kita kembangkan di kalurahan yang ada di DIY," ujarnya kepada KR di Kantor Paniradya Kaistimewaan DIY, Kapatihan Danurejan Yogyakarta, Jumat (3/5).

Lumbung Mataraman kalurahan merupakan perluasan Lumbung Mataraman tingkat kelompok yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan wilayah. Falsafah dari Lumbung Mataraman yaitu 'Nandur apa sing dipangan, Mangan apa sing ditandur'.

Artinya, menanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam.

Lumbung Mataraman menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta, yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit.

Lumbung Mataraman bukan hanya bangunan fisik, tapi lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga. Dijelaskan Aris, ada dua



KR-Wawan Isnawan
Aris Eko Nugroho SP MSi

model dukungan terhadap Lumbung Mataraman. Model pertama yaitu dukungan yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemda DIY, dan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten yang langsung berurusan dengan kelompok tani. Sedangkan model kedua adalah dukungan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) danais yang diberikan kepada kalurahan.

Lebih lanjut dijelaskan Aris, Lumbung Mataraman dengan dukungan danais sudah dimulai sejak 2016. Di awal program, masing-masing kelompok tani diberi bantuan senilai Rp 10 juta sampai Rp 50 juta, meskipun hasilnya belum bisa mengunggik potensi kalurahan secara optimal.

Tapi sekarang ada BKK danais untuk Lumbung Mataraman yang diberikan langsung kepada satu kalurahan senilai Rp 750 juta untuk dikelola oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat. "Model yang kedua ini angkanya lebih besar dan hasilnya bisa lebih optimal," ujarnya.

Menurut Aris, di DIY jumlah Lumbung Mataraman yang didanai danais ada 58

buah di 47 lokasi dengan nilai bantuan Rp 10 juta sampai Rp 50 juta (dikelola kelompok tani). Selain itu ada 11 Lumbung Mataraman yang didanai Rp 750 juta sampai Rp 950 juta yang dikelola pemerintah kalurahan bersama masyarakat yang fokus di satu lokasi.

"Hanya satu kalurahan yang didanai sampai Rp 950 juta yaitu Kalurahan Sriharjo. Saat ini Lumbung Mataraman sudah ada dan tersebar di empat kabupaten se-DIY," katanya.

Dikatakan Aris, Lumbung Mataraman dengan model BKK danais baru berlangsung selama tiga tahun sejak 2022. Meskipun Paniradya Kaistimewaan DIY belum mengevaluasi secara detail hasil yang didapat dari Lumbung Mataraman, namun diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di DIY.

Menurut Aris, salah satu keberhasilan Lumbung Mataraman adalah fokus dalam pengelolaan dan berada di satu lokasi (tidak tersebar). "Pengalaman, kalau Lumbung Mataraman tahunnya terencana-pencar hasilnya kurang optimal," ujarnya.

Sedangkan terkait luasan area untuk bisa dijadikan Lumbung Mataraman, sangat tergantung dengan komoditas yang ingin ditanam, termasuk hewan ternak yang ingin dipelihara, sehingga BKK danais yang digelontorkan senilai Rp 750 juta untuk satu kalurahan, bisa membuahkan hasil yang optimal.

"Pertanian yang dikembangkan di Lumbung Mataraman juga kita harapkan tidak hanya pertanian tradisional tapi mulai mengarah ke pertanian modern, apalagi di Yogyakarta punya petani milenial yang bisa dipakai sebagai rujukan," katanya. (Wan)

SEGERA DISIDANG DI PN SURABAYA

Gratifikasi-TPPU Eko Darmanto Rp 37,7 M

JAKARTA (KR) - Nilai dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED) mencapai sekitar Rp 37,7 miliar.

Detail dakwaan tersebut akan dibacakan secara lengkap saat sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. "Tim jaksa mendakwa dalam satu surat dakwaan untuk penerimaan gratifikasi dan TPPU terakumulasi senilai Rp 37,7 miliar. Tim penyidik KPK juga menemukan pembelian aset bernilai ekonomi oleh terdakwa ED di Grand Taman Melati Margonda 2 Jalan Margonda No. 52 A Kelurahan Pondok Cina Beji Depok Jawa Barat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/5).

KPK akan menyidangkan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Eko Darmanto (ED) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya. "Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi, pada Jumat (3/5) telah selesai melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Ali Fikri.

Menurutnya, penetapan hari sidang pertama masih menunggu informasi lanjutan dari Panitera Muda Tipikor. Dengan pelimpahan tersebut, penahanan Eko Darmanto saat ini sudah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP. "Tim jaksa berpendapat untuk tempat persidangannya berada di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dikarenakan lokasi ataupun tempat delicti atau tempat dan waktu terjadinya tindak pidana lebih dominan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," ujarnya. (Ant/Has)-f

KORUPSI GUBERNUR MALUT NON AKTIF

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru

JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi penerimaan suap dengan tersangka Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK). Pihak dimaksud adalah salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara dan satu pihak swasta.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/5) menerangkan, tim penyidik KPK menemukan informasi dan data yang menjadi alat bukti baru kaitan adanya pihak pemberi suap lain pada Abdul Gani Kasuba. "Kecukupan alat bukti menjadi poin penting KPK untuk berikutnya menyampaikan pada masyarakat mengenai identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk paparan dugaan perbuatan dan sangkaan pasalnya," ujarnya.

Namun sesuai dengan kebijakan KPK, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa disampaikan kepada publik. Detail terkait identitas tersangka, konstruksi perkara maupun pasal yang dipersangkakan akan disampaikan secara lengkap saat dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

(Ant/Has)-f



FENOMENA UDARA PANAS: Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan pantauan suhu udara di Kantor BMKG, Jakarta, Senin (6/5/2024). BMKG memastikan fenomena udara panas yang melanda Indonesia beberapa hari terakhir bukan merupakan gelombang panas (heatwave), melainkan cuaca panas yang diperkeras bakal berlangsung hingga Agustus atau September akibat dari adanya gerak semu matahari. Berita terkait di halaman 1.